

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Semoga Laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bontong, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005



DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	6
BAB. II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.2. Kebijakan Daerah (PERDA, PERBUP dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	24
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020	25
BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan	28
3.2. Hambatan-Hambatan	32
BAB. IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum OPD

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km². Terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 Km². Dan luas wilayah laut 9.146,66 Km². Dengan panjang garis pantai yaitu 670 Km.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada garis lintang -6,117331 dan garis bujur 120,462907 yang berlokasi di Jl. K.H. Dewantara No. 18, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Telepon (0414) 21028, FAX. 21732 Email : perindagkabseleyar@gmail.com

Gambaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1.





Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan di 3 (Tiga) kementerian yakni urusan wajib, bidang urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan urusan pilihan, bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

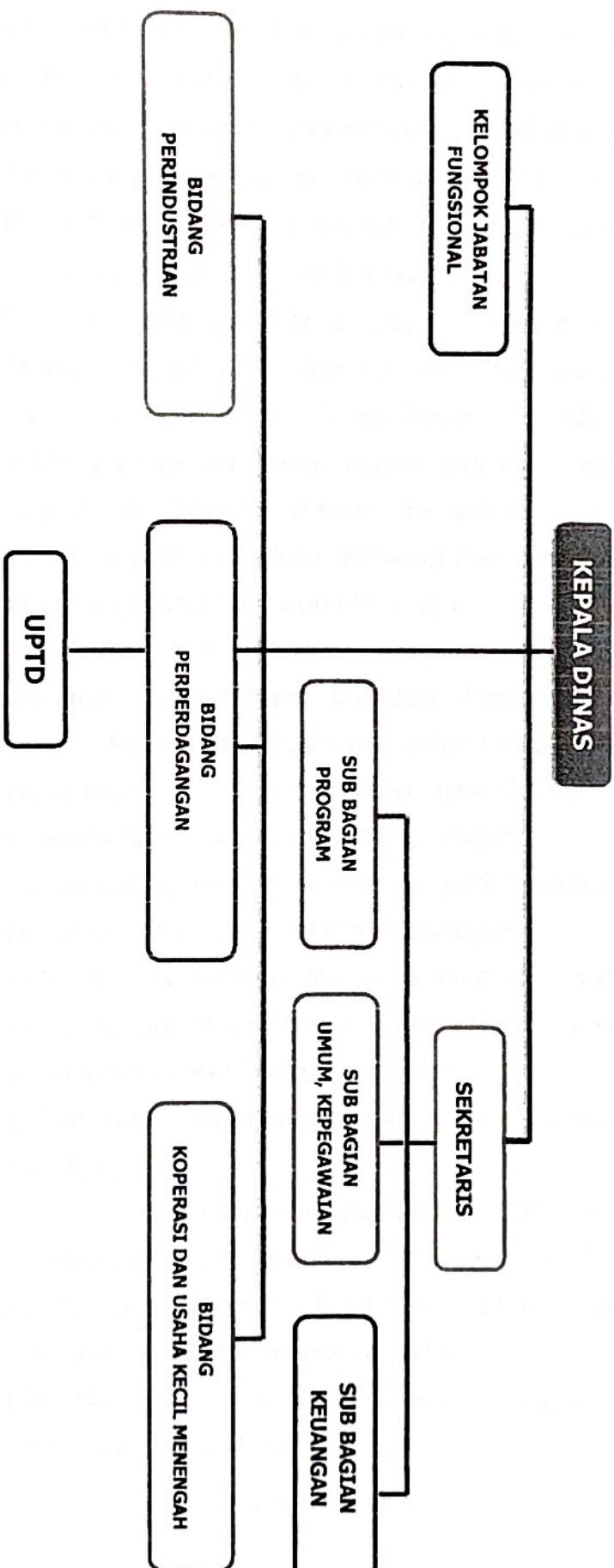
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;



- c. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas



GAMBAR 1.2.1.
STRUKTUR ORGANISASI





Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;



2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir.

✚ Data pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS
1	S2	7 orang
2	S1	17 orang
3	DIII	2 orang
4	SMA	7 orang
Jumlah		33 orang

✚ Data pegawai berdasarkan pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	2 orang
2	Pembina Tk. 1	1 orang
3	Pembina	2 orang
4	Penata Tk. 1	10 orang
5	Penata	5 orang
6	Penata Muda Tk. 1	5 orang
7	Penata Muda	4 orang
8	Pengatur Tk. 1	2 orang
9	Pengatur Muda Tk. 1	2 orang



↓ Data pegawai berdasarkan Golongan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 orang			1 orang
2	Sekretariat	1 orang	7 orang	2 orang	10 orang
3	Perindustrian	1 orang	4 orang	1 orang	6 orang
4	Perdagangan	2 orang	6 orang	1 orang	9 orang
5	Koperasi dan UKM	1 orang	6 orang		7 orang
					33 orang

↓ Jumlah Pejabat Struktural

No	Dinas/Bidang/Seksi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
4	Kepala Sub Bagian	3 orang
		8 orang



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Dana yang dianggarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2022, dengan total anggaran belanja sebesar Rp.20.048.534.875 Terealisasi sebesar Rp.18.632.135.620 atau 92,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.416.399.255,-.

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Rp.776.331.000,00	Rp.744.002.200,00	95,84
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Rp.229.131.000,00	Rp.223.231.000,00	97,43
	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan , penyebaran dan perwilayahan industri	Rp.165.000.000,00	Rp.150.552.600,00	91,24
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Rp. 5.400.000,00	Rp.5.220.000,00	96,67



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Rp.46.800.000,00	Rp.45.267.800,00	96,73
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Industri kreatif, deskransda, hari jadi sulses dan pameran industri	Rp.330.000.000,00	Rp.319.730.800,00	96,89
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase izin usaha yang dikeluarkan	Rp.8.129.742.125,00	Rp.7.627.629.034,00	93,82
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri	Rp.1.720.161.000,00	Rp.1.637.858.200,00	95,22
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/Jeneponto	Rp.6.409.581.125,00	Rp.5.989.770.834,00	93,45
3	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98



	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Surat Rekomendasi Perizinan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
5	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar rakyat yang dibina dan dikendalikan	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
6	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100
	Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100



		di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
7	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	Rp.272.070.000,00	Rp.271.422.200,00	99,76
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.102.000.000,00	Rp.101.534.000,00	99,54
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp.50.200.000,00	Rp.50.018.200,00	99,64
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Rp.119.870.000,00	Rp.119.870.000,00	100
8	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan transaksi	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
9	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat UTP dengan tanda tera sah yang berlaku	Rp.123.581.500,00	Rp.113.565.400,00	91,90
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTP bertanda tera sah yang berlaku	Rp.25.968.500,00	Rp.24.620.400,00	94,81



	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Alat UTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Rp.97.613.000,00	Rp.88.945.000,00	91,12
10	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terupdatanya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang ber-RAT	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemlitran, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Data Base yang Tersusun	Rp.553.147.000,00	Rp.550.074.000,00	99,44
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan yang terverifikasi sebagai pelaku usaha	Rp.79.400.000,00	Rp.79.344.000,00	99,93



	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Rp.203.074.000,00	Rp.202.677.200,00	99,80
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Sentra yang dikembangkan	Rp.237.160.000,00	Rp.234.560.000,00	98,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pada pelatihan	Rp.33.513.000,00	Rp.33.492.800,00	99,94
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha yang berkembang usahanya	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok UMKM Penerima Bantuan	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%)	Rp.48.762.000,00	Rp.48.202.000,00	98,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp.12.020.000,00	Rp.11.710.000,00	97,42
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.3.942.000,00	Rp.3.942.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp.7.460.000,00	Rp.7.460.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rp.1.704.000,00	Rp.1.704.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan	Rp.7.382.000,00	Rp.7.282.000,00	98,65



		Anggaran (DPPA)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPP D, Buku Profil)	Rp.8.443.000,00	Rp.8.393.000,00	99,41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp.7.811.000,00	Rp.7.711.000,00	98,72
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	Rp.2.880.932.658,00	Rp.2.822.333.888,00	97,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Rp.2.865.932.658,00	Rp.2.807.333.888,00	97,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an	Jumlah SPJ Fungsional	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun (%)	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100



	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Persentase peningkatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp.867.288.600,00	Rp.866.799.200,00	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.266.960.600,00	Rp.266.960.000,00	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.133.431.000,00	Rp.133.372.200,00	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10.000.000,00	Rp.9.570.000,00	95,7
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase peningkatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.36.120.000,00	Rp.36.120.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.420.777.000,00	Rp.420.777.000,00	100
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran (%)	Rp.734.372.150,00	Rp.682.262.900,00	92,90
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Rp.26.664.400,00	Rp.26.664.400,00	100



		Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Rp.25.530.000,00	Rp.25.530.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Rp.266.328.500,00	Rp.266.328.500,00	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Rp.166.789.250,00	Rp.148.766.000,00	89,19
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.249.060.000,00	Rp.214.974.000,00	86,31
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi dan operasional perkantoran	Rp.646.575.342,00	Rp.638.552.946,00	98,76
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.5.330.000,00	Rp.5.330.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.163.830.542,00	Rp.161.502.546,00	98,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan pelayanan umum kantor	Rp.477.414.8'00,00	Rp.471.720.400,00	98,81
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Rp.309.877.000,00	Rp.309.274.500,00	99,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.97.560.000,00	Rp.97.086.000,00	99,51



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.24.010.000,00	Rp.24.010.000,00	100
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.25.762.000,00	Rp.25.633.500,00	99,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.81.700.000,00	Rp.81.700.000,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.80.845.000,00	Rp.80.845.000,00	100

2.1.2. CAPAIAN KINERKA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 diadakan perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang semula 6 urusan yakni, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Kemetrologian, Urusan, Koperasi dan Urusan Usaha Kecil Menengah menjadi 3 urusan yakni Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

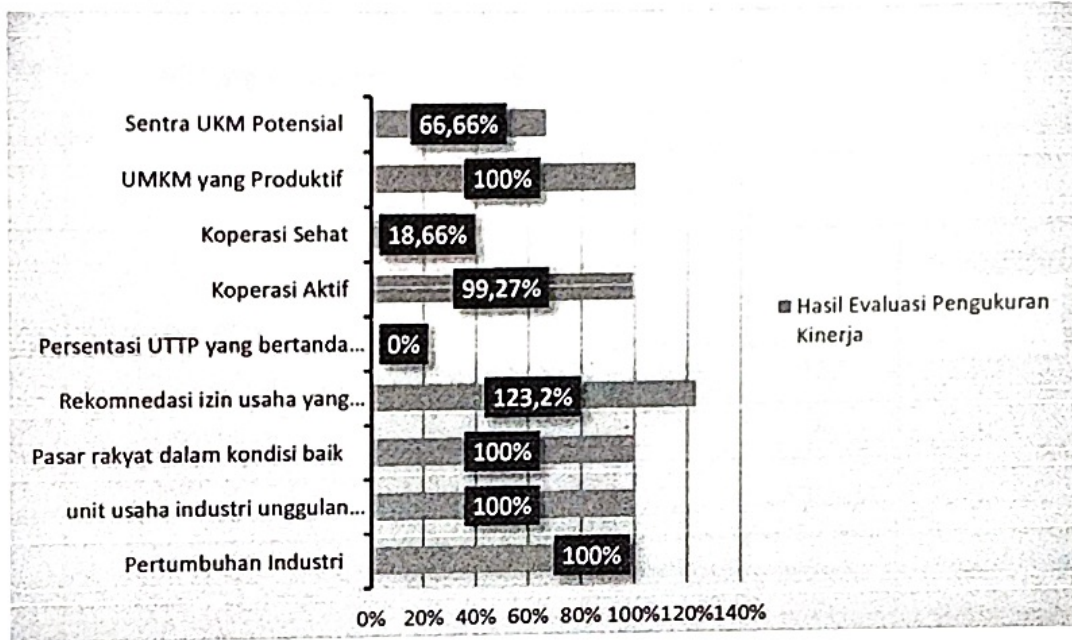


NO	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian					
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	35 IKM	40 IKM	45 IKM	25 IKM	50 IKM
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	202 IKM	25 IKM	30 IKM	32 IKM	51 IKM
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrollogian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar					
	a. Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	65%	70%	75%	80%	85%
	b. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	65	70	75	80	100
	c. Persentasi UTP yang bertanda tera SAH	250 UTP	350 UTP	500 UTP	600 UTP	600 UTP
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM:					
	a. Persentase Koperasi Aktif	116	123	130	138	138
	b. Persentase Koperasi Sehat	138	140	145	150	150
	c. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	200 UKM	250 UKM	300 UKM	350 UKM	350 UKM
	d. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	30 UKM	35 UKM	40 UKM	45 UKM	45 UKM

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang



akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan sebagai berikut :



2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Bidang Perindustrian

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian			
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100
b.	Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	51 IKM	51 IKM	100

Bidang Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
I.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolloglan serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar			
a.	Pasar rakyat dalam kondisi baik	85	85	100



b.	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2
c.	Persentase UTP yang bertanda tera SAH	600 UTP	0 UTP	0

Bidang Koperasi dan UKM

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% CapaianTh. 2022
I.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM			
a.	Persentase Koperasi Aktif	138	137	99,27
b.	Persentase Koperasi Sehat	150	28	18,66
c.	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	350 UKM	100
d.	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	30 UKM	66,66

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DI TETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan rata-rata tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan rata-rata tingkat ketercapaian indikator kinerja kegiatan untuk urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi nilainya diatas 95% dan bersesuaian dengan perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan.

2.1.5. INOVASI

Sampai saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang digital marketing, desain produk, dan penciptaan produk yang market oriented.



Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mendorong para pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam tolong menolong. Salah satu inovasi yang digagas adalah membentuk koperasi percontohan di setiap kecamatan sebagai model koperasi yang sehat yang menjadi rujukan pengelolaan koperasi lainnya, juga Pengembangan Komoditi Kelapa dan produk unggulan lainnya Melalui Satu Pintu dalam Wadah Gerbang Sari.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut berbasis potensi lokal bidang olahan komoditas kelapa, jambu mente, dan pelatihan vocational bidang olahan komoditas ikan dengan total peserta sebanyak 1215 orang pelaku IKM/UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas IKM/UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instruktur. Seperti instruktur digital marketing, olahan kelapa melalui pembuatan VCO, minyak kelapa, kerajinan berbahan batok kelapa, olahan ikan melalui pembuatan bakso ikan, siomay ikan dan otak-otak ikan.

Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instruktur. Sehingga, para peserta dapat langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha.

Selain itu, Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya product oriented, tetapi harus market oriented. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang".

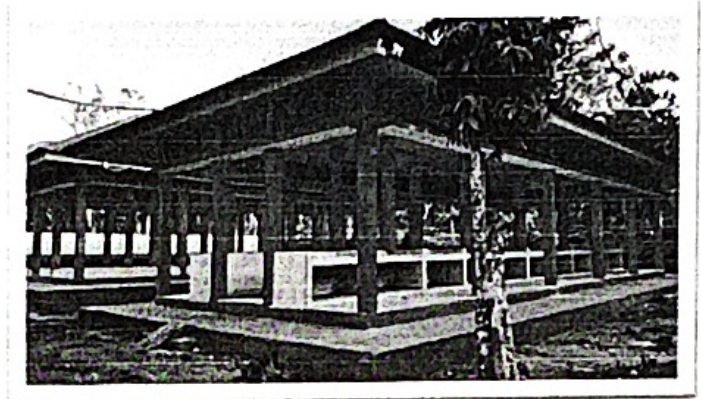
2.1.6. PRESTASI/PENGHARGAAN

Penyerahan hibah Pasar Pasimarannu dan Pasar Pasimasunggu Timur sekaligus pemberian penghargaan atas partisipasi pembangunan pasar oleh pihak Kementrian Dalam Negeri.



Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebanyak 10 (delapan) pasar di 9 kecamatan yakni tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-.



- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran sebesar Rp. 2.801.100.000,-.



Pada tahun ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.130.000.000 menjadi Rp.174.392.450 dengan kenaikan sebesar 34,15%. Selain itu juga, penyaluran dana bantuan dampak inflasi daerah kepada pelaku UMKM berhasil disalurkan sebesar Rp.2.343.200.000 kepada 2133 pelaku IKM/UMKM dengan capaian realisasi sebesar 80,66%.

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

Agar pelaksanaan kegiatan yang akan datang dapat berjalan lebih baik dan segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel. Diharapkan masukan-masukan yang positif bagi perbaikan di masa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dapat dicapai.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan, Belanja Negara Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;



9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2021
10. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021;

2. GAMBARAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu pada bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Perdagangan

Tugas pembantuan bidang urusan Perdagangan diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan dasar hukum pelaksanaan SP DIPA- 090.02.4.191438/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Perdagangan Dalam Negeri, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 5.602.010.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah). Adapun kegiatannya adalah Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.



3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

3.1.1. Target Kinerja

Target Kinerja Program

Target Kinerja Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 5.602.010.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Kegiatan :

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan 2 (dua) pasar rakyat yaitu :

- 1) Pasar Pasimasunggu Timur Kecamatan Pasimasunggu Timur
- 2) Pasar Pasimarannu Kecamatan Pasimarannu

3.1.2. Realisasi Kinerja

1. Bidang Urusan Perdagangan

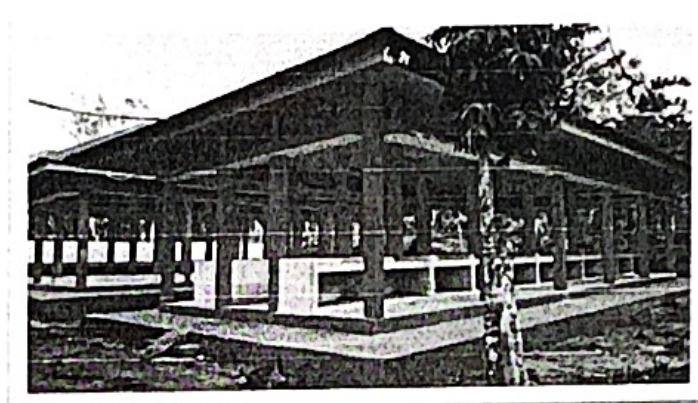
Realisasi Kinerja Program

Capaian realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan pada nomenklatur sub kegiatan pasar rakyat yang dibangun/revitalisasi ini didukung dana sebesar Rp. 5.602.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.602.010.000,- dengan capaian output 100%. Dan dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ada 2 (dua) pasar rakyat yang telah dibangun, yaitu :

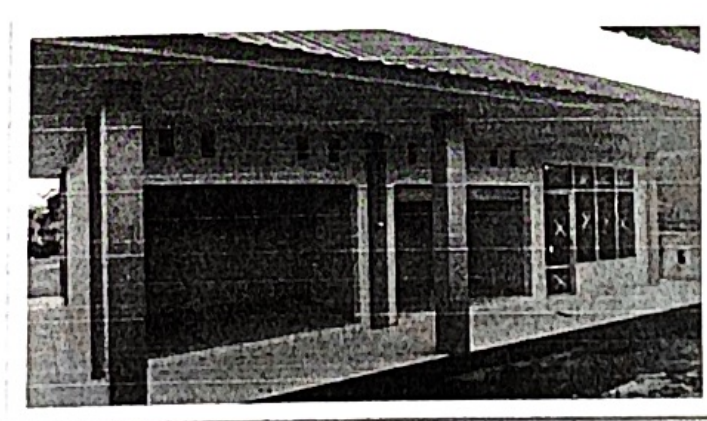
- 1) Pasar Pasimasunggu Timur Kecamatan Pasimasunggu Timur
- 2) Pasar Pasimarannu Kecamatan Pasimarannu

Berikut dibawah ini, gambar lokasi pasar rakyat yang sudah selesai dibangun :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Kecamatan Pasimasunggu Timur



- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu





- Nama CV Pihak Ketiga : 1. CV. Bintang Nusantara
(Konstruksi Pasimarannu)
2. CV. Nabilah Multicon (Pengawas
Pasimarannu)
3. CV. Rahmat Abadi (Kontruksi
Pasimasunggu Timur)
4. PT. Cempniga Raya Consultan
(Pengawas Pasimasunggu Timur)
- Nama Pegawai : 1. Andi Abdurrahman, SE, M. Si
(KPA)
2. Mardiana, ST (PPK)
3. Andi Jora, S.H. (PPSPM)
4. Aburaera Djamal. A.Md
(Bendahara Pengeluaran)



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENGUSASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Pasimasunggu Timur dan Kec. Pasimaranu	Dinas PERINDAG KUKM Kab. Kep. Selayar	Rp 5.602.010.000,00	Rp 5.602.010.000,00	100	2 Unit	100	
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pengusan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Kewital isasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA.2021	Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Output : Sarana Perdagangan yang dibangun/direvitalisasi								



3.2. HAMBATAN – HAMBATAN

Selama proses pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak ditemukan kendala yang berarti sehingga kegiatan berjalan baik dan tepat waktu.

3.3. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Agar pelaksanaan kegiatan yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel. diharapkan masukan-masukan yang positif bagi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 Unit Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja instansi di masa datang.

Semoga keinginan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.



LAMPIRAN

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah	4 RKPD Tahun 2022 DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6 Alokasi Anggaran Rp. 14.408.880.875	7 Realisasi Anggaran Rp. 13.754.056.668	8 1. Belum optimalnya data lewat SIINAs karena terkendala banyaknya persyaratan tambahan data dukung yang sulit dipenuhi oleh pelaku IKM seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha, OSS, dan lainnya. 2. Luasnya area cakupan pelaku industri meliputi 6 (enam) kecamatan di Kepulauan, sehingga sulit untuk mengakses pelaku industri secara bersamaan 3. Jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas 4. Masih lemahnya SDM pelaku IKM di Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Sulitnya mengakses permodalan karena keterbatasan lembaga bank dan non bank, hal ini yang menyebabkan pelaku IKM sangat sulit untuk ekspansi	9 1. Menyiapakan dana darurat yang memadai 2. Melakukan langkah-langkah penganggaran yang tepat 3. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data 4. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacuum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari	10 -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	usaha. Untuk dikepalauan lembaga keuangan bank yang ada baru 1 (satu), itupun statusnya masih kantor kas sehingga tidak bisa memutus kredit. Hal ini menyebabkan semua pelaku usaha yang berdomisili di 6 (enam) kecamatan kepulauan harus datang ke ibu kota kabupaten untuk bisa mengakses kredit dilembaga keuangan, itupun maksimal hanya Rp. 500 juta untuk harus diakses lewat kantor wilayah Makassar	kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan	
				5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		5. Melakukan sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah	
				6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		6. Meningkatkan produksi pertanian, agro industri dan perikanan	
				7. Evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen		7. Penyajian dokumen IPRO (Investment Project Ready To Offer) KIPIT dan KIS kerjasama dengan Kementerian Investasi (BKPN)	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	39 orang	32 orang		kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, disebabkan oleh kurangnya hubungan kemitraan dalam hal pemasaran, design produk yang masih konservatif, kualitas produk belum memenuhi standar pasar, dan sisi higienis produk yang masih perlu ditingkatkan, cita rasa yang masih	
					Alokasi Anggaran Rp. 2.880.932.658	Realisasi Anggaran Rp. 2.822.333.888			
					Alokasi Anggaran Rp. 2.865.932.658	Realisasi Anggaran Rp. 2.807.333.888			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	perlu mendapat diperensiasi dan lainnya.		
					Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000	7. Untuk tahun berjalan, belum optimalnya peran strategis struktur industri dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena banyaknya anggaran yang direlokasi dan diarahkan kepada penanganan dampak pandemi covid-19 khususnya menyangkut aktifitas perindustrian		
				3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8. Belum optimalnya realisasi program kepulauan selayar sebagai pusat distribusi logistik (PDL) kawasan Indonesia Timur dan pembangunan Kawasan Industri Selayar (KIS)		
					Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000			
				4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
					Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 10.000.000			
				1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 10.000.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
					Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000			
				1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alokasi Anggaran Rp.867.288.600	Realisasi Anggaran Rp.866.799.200			
					100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp.266.960.600	Realisasi Anggaran Rp. 266.960.000			
				2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 133.431.000	Realisasi Anggaran Rp. 133.372.200			
				3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	95,70%			
					Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 9.570.000			
				4. Fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 36.120.000	Realisasi Anggaran Rp. 36.120.000			
				5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 420.777.000	Realisasi Anggaran Rp. 420.777.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Rp. 734.372.150	Realisasi Anggaran Rp. 682.262.900			
				1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit			
				2. Pengadaan mebel	7 Unit	7 Unit			
				3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Alokasi Anggaran Rp. 25.530.000	Realisasi Anggaran Rp. 25.530.000			
				4. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	7 Unit	11 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp. 266.328.500	Realisasi Anggaran Rp. 266.328.500			
				5. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp. 166.789.250	Realisasi Anggaran Rp. 148.766.000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp. 249.060.000	Realisasi Anggaran Rp. 214.974.000			
					Alokasi Anggaran Rp. 646.575.342	Realisasi Anggaran Rp. 638.552.946			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 5.330.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.330.000			
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	98,58%			
					Alokasi Anggaran Rp. 163.830.542	Realisasi Anggaran Rp. 161.502.546			
				3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	98,81%			
					Alokasi Anggaran Rp. 477.414.800	Realisasi Anggaran Rp. 471.720.400			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Alokasi Anggaran Rp. 309.877.000	Realisasi Anggaran Rp. 309.274.500			
				1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	99,51%			
					Alokasi Anggaran Rp. 97.560.000	Realisasi Anggaran Rp. 97.086.000			
				2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 24.010.000	Realisasi Anggaran Rp. 24.010.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	99,50%			
					Alokasi Anggaran Rp. 25.762.000	Realisasi Anggaran Rp. 25.633.500			
				4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 81.700.000	Realisasi Anggaran Rp. 81.700.000			
				5. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 80.845.000	Realisasi Anggaran Rp. 80.845.000			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
					Alokasi Anggaran Rp. 776.331.000	Realisasi Anggaran Rp. 744.002.200			
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
					Alokasi Anggaran Rp. 776.331.000	Realisasi Anggaran Rp. 744.002.200			
				1. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	12 sentra	3 sentra			
					Alokasi Anggaran Rp. 299.131.000	Realisasi Anggaran Rp. 223.231.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perrwilayahan industri	1 Kali	1 Kali			
					Alokasi Anggaran Rp. 165.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 150.552.600			
				3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	16 Kali	1 Kali			
					Alokasi Anggaran Rp. 5.400.000	Realisasi Anggaran Rp. 5.220.000			
				4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Kawasan	1 Kawasan			
					Alokasi Anggaran Rp. 46.800.000	Realisasi Anggaran Rp. 45.267.800			
				5. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	4 Kali	2 Kali			
					Alokasi Anggaran Rp. 330.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 319.730.800			
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
					Alokasi Anggaran Rp. 8.129.742.125	Realisasi Anggaran Rp. 7.627.629.034			
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					
					Alokasi Anggaran Rp. 8.129.742.125	Realisasi Anggaran Rp. 7.627.629.034			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam sistem informasi industri nasional (SII Nas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	95,22%			
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	93,45%			
					Alokasi Anggaran Rp. 1.720.161.000	Realisasi Anggaran Rp. 1.637.858.200			
					Alokasi Anggaran Rp. 6.409.581.125	Realisasi Anggaran Rp. 5.989.770.834			
2	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah	RKPD Tahun 2020	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Alokasi Anggaran Rp. 20.405.500	Realisasi Anggaran Rp. 17.137.500	1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan 2. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum	1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Melakukan pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar	-
			DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Alokasi Anggaran Rp. 20.405.500	Realisasi Anggaran Rp. 17.137.500			
				1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,	100%	83,98			
					Alokasi Anggaran Rp. 20.405.500	Realisasi Anggaran Rp. 17.137.500			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang	3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat	
				PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Alokasi Anggaran Rp. 123.327.000	Realisasi Anggaran Rp. 121.852.250	3. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih menasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar	4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan terkait Metrologi Legal	
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Alokasi Anggaran Rp. 73.327.000	Realisasi Anggaran Rp. 72.022.250	menasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar	5. Anggaran tidak tersedia	
				1. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	98,22%		6. Anggaran dan calon peserta diklat tidak tersedia	
				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Alokasi Anggaran Rp. 50.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 49.830.000	4. Menurunnya omzet para pedagang akibat menurunnya daya beli masyarakat oleh karena adanya pandemi covid-19 sampai saat ini		
				1. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	32 Pasar	28 Pasar	5. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar target pendapatan dapat tercapai adalah dengan		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Alokasi Anggaran Rp. 337.490.000	Realisasi Anggaran Rp. 308.712.200	mengidentifikasi pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.		
							6. Adanya beberapa pasar yang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 37.290.000	Realisasi Anggaran Rp. 37.290.000	dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.		
				1. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	100%	100%			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 37.290.000	Realisasi Anggaran Rp. 37.290.000	7. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan tera dan tera ulang masih kurang		
				1. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	100%	99,54%	8. Tidak adanya kendaraan operasional yang akan lebih memaksimalkan pelayanan tera dan tera ulang		
				2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Alokasi Anggaran Rp. 102.000.000	Realisasi Anggaran Rp. 101.534.000	9. Kurangnya SDM Kemetrolgian		
					100%	99,64%			
					Alokasi Anggaran Rp. 50.200.000	Realisasi Anggaran Rp. 50.018.200			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	100%			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Alokasi Anggaran Rp. 119.870.000	Realisasi Anggaran Rp. 119.870.000			
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 102.760.000	Realisasi Anggaran Rp. 102.672.902			
				1. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1 Kali	1 Kali			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alokasi Anggaran Rp. 102.760.000	Realisasi Anggaran Rp. 102.760.000			
				Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alokasi Anggaran Rp. 123.581.500	Realisasi Anggaran Rp. 113.565.400			
					Alokasi Anggaran Rp. 123.581.500	Realisasi Anggaran Rp. 113.565.400			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	650 Alat	0			
					Alokasi Anggaran Rp. 25.968.500	Realisasi Anggaran Rp. 24.620.400			
				2. Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp. 97.613.000	Realisasi Anggaran Rp. 88.945.000			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Alokasi Anggaran Rp. 23.940.000	Realisasi Anggaran Rp. 23.599.200			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Alokasi Anggaran Rp. 23.940.000	Realisasi Anggaran Rp. 23.599.200			
				1. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	5 Media	1 Media			
					Alokasi Anggaran Rp. 23.940.000	Realisasi Anggaran Rp. 23.599.200			
3.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RKPD Tahun 2021 DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			1. Minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang pendataan SIKP 2. Data yang tidak akurat, tidak teratur dan masih banyak yang Dobel 3. Masih kurang Sentra yang serius untuk mengembangkan hasil produksinya	1. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pentingnya pendataan SIKP 2. Perlu adanya tenaga operator komputer yang dapat memudahkan data tidak dobel 3. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan, akan memberikan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4. Kurangnya SDM Pelaku Usaha	dampak yang positif bagi pelaku sentra	
				1. Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	135 Koperasi	165 Koperasi	5. Kurangnya pelatihan bagaimana cara mengembangkan usahanya biar cepat meningkat	4. Perlu mengubah mindset para pelaku usaha dengan mereka bagaimana cara	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Alokasi Anggaran Rp. 48.578.000	Realisasi Anggaran Rp. 48.413.000	6. Kurangnya akses dan pengetahuan pemasaran hasil produk UKM	mengembangkan apa yang telah didapat dalam pelatihan	
				Pendidikan dan Latihan	Alokasi Anggaran Rp. 163.640.000	Realisasi Anggaran Rp. 163.640.000	7. Belum ada inovasi terkait pengembangan usahanya	5. Memperkenalkan cara memasarkan melalui online	
				Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 163.640.000	Realisasi Anggaran Rp. 163.640.000	8. Pengemasan produk belum layak jual	6. Memperkenalkan branding yang bagus	
				1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkerasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	162 Koperasi	11 operasi	9. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan barang	7. Perlu adanya pelatihan cara pengemasan	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Alokasi Anggaran Rp. 163.640.000	Realisasi Anggaran Rp. 163.640.000	10. Minimnya pengetahuan pemasaran produk melalui market place dan media online	8. Pihak ULP dalam menentukan rekanaan harus yang konsisten dan komitmen	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Alokasi Anggaran Rp. 553.147.000	Realisasi Anggaran Rp. 550.074.000			
					Alokasi Anggaran Rp. 553.147.000	Realisasi Anggaran Rp. 550.074.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 2. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro 3. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro 4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	30 UMKM Alokasi Anggaran Rp. 79.400.000 100 UMKM Alokasi Anggaran Rp. 203.074.000 1 Sentra Alokasi Anggaran Rp. 237.160.000 100% Alokasi Anggaran Rp. 33.513.000 Alokasi Anggaran Rp. 4.170.915.000 Alokasi Anggaran Rp. 4.170.915.000	60 UMKM Realisasi Anggaran Rp. 79.344.000 75 UMKM Realisasi Anggaran Rp. 202.677.200 1 Sentra Realisasi Anggaran Rp. 234.560.000 99,94% Realisasi Anggaran Rp. 33.492.800 Realisasi Anggaran Rp. 3.428.412.500 Realisasi Anggaran Rp. 3.428.412.500			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	100%	82,20%			
					Alokasi Anggaran Rp. 4.170.915.000	Realisasi Anggaran Rp. 3.428.412.500			

Ponteng, 30 Januari 2023



ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian				
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	IKM	25	25	100
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	IKM	51	51	100
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar				
	a. Pasar rakyat dalam kondisi baik	Pasar	85	85	100
	b. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi	1000	1232	123.2
	c. Persentase UTP yang bertanda tera SAH	UTP	600	0	0
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM				
	a. Persentase Koperasi Aktif	Koperasi	138	137	99.27
	b. Persentase Koperasi Sehat	Koperasi	150	28	18.66
	c. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	UKM	350	350	100
	d. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	UKM	45	30	66.66

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
Urusan Bidang Perindustrian					
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian				
a	Pertumbuhan Sektor Industri	IKM	25	25	100
b	Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	IKM	51	51	100

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
Urusan Bidang Perdagangan					
I.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar				
a	Pasar rakyat dalam kondisi baik	Pasar	85	85	100
b	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi	1000	1232	123.2
c	Persentase UTTP yang bertanda tera SAH	UTTP	600	0	0

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% CapaianTh. 2022
Urusan Bidang Koperasi dan UKM					
I.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM				
a	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi	138	137	99,27
b	Persentase Koperasi Sehat	Koperasi	150	28	18,66
c	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	UKM	350	350	100
d	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	UKM	45	30	66,66

2.1.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Bidang Perindustrian	Rp 14.408.880.875,00	Rp 13.754.056.668,00	Rp 654.824.207,00	98,45	3	96%	10	98%
2	Urusan Bidang Perdagangan	Rp 731.504.000,00	Rp 687.539.452,00	Rp 43.964.548,00	93,98	6	94%	8	97%
3	Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Rp 4.936.280.000,00	Rp 4.190.539.500,00	Rp 745.740.500,00	84,89	4	95%	4	95%

2.1.5 INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Aktifasi Kelembagaan Melalui Pola Penerapan Sistem Pembelajaran Terhadap Koperasi Percontohan	Sebagai model koperasi yang sehat yang akan menjadi percontohan bagi koperasi lainnya sehingga mampu mensejahterakan anggotanya dan menggerakkan ekonomi masyarakat	Terbentuknya koperasi percontohan di setiap kecamatan	
2	Pengembangan Komoditi Kelapa dan Turunannya Melalui Satu Pintu dalam Wadah Gerbang Sari	Agar komoditi kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai nilai tambah secara ekonomi melalui produk turunannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Terbentuknya sentra pengolahan komoditi kelapa dan turunannya di beberapa desa	

2.1.6 PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							Nihil
2.							Nihil

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tentang	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	3			
1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
2	Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Penduduk Miskin					
3	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah					
4	Meningkatkan Perdagangan Daerah dengan Penguatan Pasar dalam Negeri	551/82/III/2022/Disperindag KUKM		Himbauan kepada ASN, PHL, dan masyarakat berbelanja di Pasar Sentral Bonea dan memanfaatkan pembelian secara online melalui https://pasar.id/pasarbonea	Diharapkan bertambahnya pembeli (ASN, PHL, masyarakat) yang berbelanja di Pasar Sentral Bonea sehingga aktivitas ekonomi dapat bangkit dan pulih kembali pasca pandemi Covid-19	

2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1	Diharapkan kiranya ada UPT. Dinas Pertambangan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih memperjelas aturan dan lokasi dimana masyarakat bisa melakukan aktivitas penambangan	Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	Sudah terdapat UPT. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bulukumba dimana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wilayah kerjanya
2	Untuk izin pertambangan, masyarakat dapat berkoordinasi dan berkonsultasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar		

30 Januari 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

